

TESIS

**PEMUDA DAN KONFLIK PILKADA:
KASUS PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 2013**

***YOUTH AND ELECTION CONFLICT:
A CASE OF PALOPO MAYOR ELECTION IN 2013***

**AHMAD KAIMUDDIN OMBE
P0205216014**



**PROGRAM MAGISTER
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEMUDA
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



Optimization Software:
www.balesio.com

**PEMUDA DAN KONFLIK PILKADA:
KASUS PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 2013**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun Dan Diajukan Oleh

AHMAD KAIMUDDIN OMBE

Kepada

**JURUSAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2019



**PEMUDA DAN KONFLIK PILKADA:
KASUS PEMILIHAN WALIKOTA PALOPO 2013**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun Dan Diajukan Oleh

AHMAD KAIMUDDIN OMBE

Kepada

**JURUSAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2019



TESIS

PEMUDA DAN KONFLIK PILKADA: KASUS PEMILIHAN WALIKOTA (PILWALKOT) KOTA PALOPO 2013

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD KAIMUDDIN OMBE
Nomor Pokok P0205216014

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 25 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS
Ketua



Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS
Anggota

Ketua Program Studi
dan Pengembangan Wilayah,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Optimization Software:
www.balesio.com



Ahmad Munir, M.Eng




Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ahmad Kaimuddin Ombe

NIM : P0205216014

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen
Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2019

Yang menyatakan

Ahmad Kaimuddin Ombe



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemuda dan Konflik Pilkada: Kasus Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Palopo 2013” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister (M.Si.) dalam bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda pada program studi Perencanaan Pengembangan wilayah.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan serta bantuan dan doa dari berbagai pihak maka Karya Ilmiah Akhir ini akan sulit terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS dan Prof Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS sebagai komisi penasehat penulisan tesis yang selalu tulus senantiasa mendidik, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini sebagai syarat mencapai gelar magister perencanaan pengembangan wilayah / manajemen kepemimpinan pemuda.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng, Dr. Iqbal Sultan, M.Si, Dr. Muh.

atta Jamil, SP.,M.Si sebagai Dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan tesis ini.



3. Kedua Orang tua tercinta Bapak Ilham Ombe, SE dan Ny Rahmatia, SP. Karena atas dukungan serta doa mereka yang memberikan semangat dan motivasi diri demi membahagiakan dan membanggakan mereka. Serta Adik-adik kandung penulis Igaruddin Ombe, Ade Putri Sari Dewi, Ajira Sandra Dewi, Ira Titin Ombe dan Icha yang ikut mensupport dan selalu mendoakan.
4. Para informan dan unsur stakeholder terkait (KPUD Kota Palopo, Panwaslu Kota Palopo, Porles Kota Palopo, Kantor Harian Palopo Pos, DPD II KNPI Kota Palopo, LMND Palopo, HMI Cabang Palopo serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan bantuan-bantuan dalam mendukung penyelesaian penulisan karya ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 PPW/MKP Kemenpora Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan kebaikan selama ini. Semoga kita semua sukses dan menjadi orang-orang yang bermanfaat kedepannya. Amin.
6. Kawan-kawan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Selatan (LMND Sulsel), terkhusus Eksekutif LMND Kota Palopo (Kak Abho, Kak Odhy, Black, Syahrul, Athoks, Wahid, Akmal, Didin dan kawan-kawan pengurus yang lain) yang telah banyak membantu secara teknis maupun non teknis selama proses penyusunan tesis dan penelitian di Kota Palopo.



7. Kanda Asmin, Farid, dan Anwar terima kasih atas kebersamaan dan saling support satu sama lain sehingga dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang bersamaan. Terkhusus, Saudari Karmilasari, yang tidak henti memberikan doa, dukungan motivasi dan perhatian selama penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Unhas.
8. Seluruh pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas saran dan kritiknya. Semoga bantuan, dukungan serta semua amal kebbaikannya mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya, penulis persembahkan tesis ini sebagai bentuk sumbangsih ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga tesis ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk rekan sejawat, meneliti dan menyempurnakan tema ini lebih lanjut. Penulis juga menyadari karya ini jauh dari kata sempurna,. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan dan segala yang tidak berkenang pada karya ini. Penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisan ini.

Makassar, 25 Januari 2019

Ahmad Kaimuddin Ombe



ABSTRAK

AHMAD KAIMUDDIN OMBE. *Pemuda dan Konflik Pilkada: Kasus Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Palopo 2013* (dibimbing oleh Darmawan Salman dan Hazairin Zubair).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) keterlibatan pemuda sebagai pemicu awalnya terjadi konflik; (2) keterlibatan pemuda pada saat terjadi eskalasi konflik; (3) upaya peran pemuda dan *stakeholder* dalam upaya resolusi konflik yang berjalan; dan (4) dampak konflik terhadap kondisi wilayah Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari informan yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Kemudian, data diolah, dimulai dengan mereduksi data, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan pemuda dalam rangkaian peristiwa terjadinya konflik Pilkada Kota Palopo. Mulai awal terjadinya konflik, eskalasi konflik, dan upaya resolusi konflik bersama unsur *stakeholders*. Keterlibatan itu terintegrasi di dalam tim pemenangan pasangan calon masing-masing. Konflik pilkada yang terjadi karena amuk massa dari salah satu pendukung calon yang tidak puas atas putusan hasil pleno KPUD Kota Palopo tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Pilwalkot Kota Palopo pada putaran kedua. Kuat dugaan bahwa kerusuhan terjadi dikarenakan adanya indikasi pengelembungan suara di beberapa TPS. Konflik pilkada pada Pemilihan Calon Walikota Palopo pada tahun 2013 tidak hanya melahirkan dampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi wilayah Kota Palopo.

Kata kunci: pemuda, konflik pilkada, Kota Palopo



ABSTRAC

AHMAD KAIMUDDIN OMBE. *Youth and Election Conflict: A Case of Palopo City Mayor (Pilwalkot) Election, in 2013* (Supervised by **Darmawan Salman** and **Hazairin Zubair**)

This study aims (1) To find out the involvement of youth as the initial trigger of conflict; (2) Youth involvement in times of escalation of conflict; (3) Effects to play the role of youth and stakeholders in the efforts of ongoing conflict resolution; (4) Impact of conflict on the condition of Palopo City area.

This study used descriptive qualitative methods. Data were collected from informants who came in direct contact with the object of the research using in-depth interviews and documentation collected during the research process. Data that had collected were then processed. Starting with data reduction, the data then presented, to draw conclusions.

The results of the study show that there is youth involvement in a series of incidents of regional election conflicts in Palopo City. Starting from the beginning of the conflict, escalation of conflict and conflict resolution efforts with stakeholders. The involvement is integrated in each of the winning teams of the candidate pairs. Election conflicts that occur due to mass anger from one of the supporters of the candidates who is dissatisfied with the decision made by the plenary meeting of the Palopo City Election Commission on the results of the recapitulation of Pilwalkot City of Palopo Votes in the second round. The riots are allegedly strong due to indications of ballooning in several polling stations. The election conflict on the Election of Candidates for Palopo Mayor in 2013, not only give birth to an psychological, social, and economic impacts, but also has an impact on the condition of the city of Palopo.

Keywords : Youth, Election Conflict, Palopo City



Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
Tinjauan Teori dan Konsep.....	10
Angka Pikir.....	36



BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengambilan Narasumber	46
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Kota Palopo	48
1. Sejarah Terbentuknya Kota Palopo	48
2. Geografis dan Peta Kota Palopo.....	52
B. Pembahasan.....	57
1. Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Palopo Tahun 2013	57
2. Karakter Pemuda Palopo (Tana Luwu).....	61
3. Pemuda dalam Pusaran Konflik Pilkada, Pemilihan WaliKota (Pilwalkot) Palopo 2013.	63
4. Dampak Konflik Terhadap Kondisi Wilayah, dan Upaya Pemulihan Konflik.....	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1.1 Perolehan Suara Paslon Kepala Daerah Palopo 2013-2018.....	6
Tabel 3.1 Data Sekunder	42
Tabel 3.2 Daftar Informan	43
Tabel 4.1 Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015.....	55
Tabel 4.3 Persentasi Penduduk usia 7-24 Tahun dan Partisipasi Sekolah di Kota Palopo.....	57
Tabel 4.4 Daftar Calon Walikota dan wakil Walikota Palopo tahun 2013.	60
Tabel 4.5 Perolehan Suara Pilwalkot Kota Palopo Putaran 1.....	61
Tabel 4.6 Matriks hasil Wawancara I.....	70
Tabel 4.7 Matriks hasil Wawancara II.....	77



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Peta Kota Palopo 2014.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran.....	107
1. Pedoman Wawancara.....	109
2. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dengan disahkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hal ini dianggap sebagai titik balik bagi praktik berdemokrasi di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memilih pemimpinnya. Namun dalam pelaksanaannya, Pilkada langsung tidak semulus dengan apa yang diharapkan, yang terjadi justru menimbulkan keresahan oleh banyak pihak. Hal ini dipicu oleh munculnya banyak konflik dengan eskalasi yang cukup tinggi dalam setiap Pilkada yang dilaksanakan di beberapa daerah. Mulai dari pertikaian antar pendukung, perusakan fasilitas publik hingga perusakan gedung-gedung milik pemerintah yang tak terhitung jumlahnya (Armunanto, 2015).

Perkembangan politik semacam ini tentu menyisakan berbagai persoalan baik pada saat pra-Pilkada, pada saat Pilkada dan pasca-Pilkada. Kemunculan konflik-konflik lokal diberbagai daerah dalam menghadapi arus demokrasi langsung tersebut, sulit untuk dihindari. Sorensen berpendapat bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan

masyarakat, yang bersumber dari dan kemorosotan



otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki (Zein, 2005).

Dalam proses pelaksanaannya, Pilkada langsung ternyata seringkali menyebabkan sejumlah persoalan terkait proses pelaksanaannya yang dinilai cenderung menghamburkan dana rakyat termasuk dugaan *money politic*, serta tidak jarang hasil Pilkada langsung itu direspon secara negatif sehingga berbuntut kerusuhan dan kekerasan. Dalam konteks negara demokrasi, Maswadi Rauf menyatakan bahwa wajar apabila demokrasi dipenuhi oleh konflik karena setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingan dan pendapat masing-masing yang bukan saja berbeda tetapi bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Kebebasan untuk mengkritik atau menentang pihak lain yang mempunyai pendapat dan kepentingan yang berbeda atau berlawanan yang membuat konflik kepentingan pesat didalam masyarakat (Amiruddin, 2017 & Nas, 2014).

Perbedaan kepentingan politik sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam konteks demokrasi. Demokrasi sesungguhnya membuka kran kebebasan untuk berekspresi, dan berserikat dalam masyarakat politik. Meskipun demikian terjadinya konflik politik bahkan hingga sampai pada arah kekerasan politik juga sesuatu yang sulit dihindari. Pilkada juga membuka terjadinya *conflict interpretation*, *conflict*

st, *conflict of accountability*, *conflict of supervisory* dan *conflict of tlement* (Sulistyaningsih, 2005 & Wibawa, 2005).



Dalam kaitan potensi konflik tersebut, menurut Haris dalam Wahyudi (2011) berpendapat bahwa setidaknya ada lima sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan dan pengumuman hasil Pilkada:

1. Konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah dan darah. Mobilisasi politik atas nama etnik dan agama, baik secara bersama maupun terpisah, potensial muncul di wilayah-wilayah dimana ketegangan etnis cenderung tinggi seperti di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, serta daerah-daerah dimana proporsi penduduk secara etnik dan agama relatif berimbang. Sementara konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama daerah asal (asli-pendatang) mungkin potensial muncul di setiap daerah yang melaksanakan pemilihan. Sementara itu, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama 'golongan darah' (bangsawan atau bukan) potensial muncul di daerah-daerah bekas kerajaan atau kesultanan di masa silam, dan daerah-daerah dimana relasi politik atas dasar strata sosial masih cukup dominan.
2. Konflik yang bersumber dari *negative campaign* antar pasangan calon kepala daerah. Berbeda dengan pemilihan presiden, dimana kandidat hanya dikenal melalui media cetak atau elektronik. Para calon kepala daerah adalah tokoh-tokoh yang hampir setiap saat dijumpai di daerah. Sebagian besar



masyarakat bahkan mungkin sangat mengenal pribadi dan asal-usul tiap calon. Karena itu, *negative campaign* yang mengarah munculnya fitnah mengenai integritas kandidat bisa mengundang gesekan antarmassa pendukung dalam kampanye Pilkada.

3. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Gejala ini sudah muncul di beberapa daerah, saat massa pendukung calon memprotes keputusan KPUD karena calon tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan undang-undang. Premanisme politik dan pemaksaan kehendak juga bisa muncul setelah Pilkada dan hasilnya diumumkan oleh KPUD jika calon kepala daerah tidak berbesar hati menerima kekalahan sehingga memprovokasi massa pendukungnya.
4. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan perhitungan hasil Pilkada. Konflik jenis ini berpeluang muncul dimana petahana mencalonkan kembali. Netralitas panitia Pilkada ditingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS) sangat menentukan. Potensi konflik juga bisa muncul apabila aparat birokrasi (PNS, TNI dan Polri) ada kecenderungan dukungan terhadap kandidat tertentu.
5. Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran aturan main penyelenggaran Pilkada. Perbedaan penafsiran tersebut potensial mengundang konflik jika ditafsirkan secara berbeda.



Konflik dalam dunia politik kentaldengan nuansa-nuansa kepentingan, baik kepentingan yang dipertahankan sebagai *status quo*, maupun kepentingan yang akan diperjuangkan sebagai dasar untuk mencapai suatu perubahan. Kelompok atau orang-orang yang berada dalam level penguasa yang memiliki otoritas dengan yang berada di luar level penguasa, didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bergerak atas dasar kepentingan. Kepentingan ini selalu akan diperjuangkan oleh mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok mereka (Ritzer, 2012:452).

Untuk mencapai kepentingan tersebut dibutuhkan sebuah gesekan-gesekan yang terjadi berupa konflik sosial. Sebagaimana dalam pelaksanaan Pilkada yang berdampak pada stabilitas keamanan daerah. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Pilkada telah menelan korban sampai 47 orang. Dari 224 daerah yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2010, sebanyak 73% dari Pilkada tersebut diwarnai dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Catatan dari Kesbangpol Depdagri menunjukkan bagaimana konflik dalam Pilkada itu nyata menelan korban. Menurut data tersebut, dari tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa dari 486 daerah yang melakukan Pilkada, hampir setengah dari Pilkada tersebut bermasalah, Kemendagri pada saat itu mengungkapkan bahwa sejak pelaksanaan Pilkada langsung di seluruh Indonesia, sudah ada 50

ang tewas akibat kisruh antar pendukung kandidat. Humaedi dkk



Konflik Pilkada Kota Palopo menjadi kasus terbesar dan sangat fenomenal di tahun 2013. Konfigurasi Pilkada diwarnai dengan aksi pembakaran pada beberapa kantor instansi pemerintah dan swasta. Kantor-kantor tersebut diantaranya kantor Walikota Palopo, kantor Kecamatan Wara Timur, kantor media Palopo Pos dan sekretariat Partai Golkar. Massa menilai ada tindak kecurangan pada beberapa tempat pemungutan suara (Syarif, 2013).

Intensitas politik pada Pilkada Palopo tahun 2013 memang tergolong tinggi. Pilkada dihelat dalam dua putaran, putaran pertama diikuti sembilan pasangan calon, sedangkan putaran kedua menyisakan pertarungan antara HM. Judas Amir-Akhmad Syarifuddin (JA) dan H. Haidar Basri-H. Thamrin Jufri (HATI).

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Palopo 2013-2018

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara (%)
HM. Judas Amir-Akhmad Syarifuddin	PDP, PNKB, PPDI, Partai Kedaulatan	50,5%
H. Haidir Basir-H. Thamrin Jufri	PPP, PKB, PKPB, PBR, PKS	49,5%
Jumlah		100%

Sumber: KPUD Kota Palopo

Dari rangkaian permasalahan yang telah diuraikan di atas, berkaitan dengan keterlibatan pemuda sebagai pemicu konflik pada saat

Kota Palopo tahun 2013 yang melatar belakanginya penelitian tingkat judul tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti



tentang konflik Pilkada dan konflik pemuda. Sebagaimana yang diteliti oleh Armunanto (2015) yang menunjukkan hasil bahwa Faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 jika ditinjau dari faktor sosiologis dan faktor institusional. Faktor sosiologis terdiri atas tiga aspek yakni: (1) Pembilahan sosial kota Makassar, (2) Hubungan politik, dan (3) Karakteristik pemilih kota Makassar. Sedangkan faktor institusional terdiri atas dua aspek yakni: (1) Penyelenggara pemilu dan (2) Konflik internal partai politik.

Penelitian tentang konflik pemuda diteliti oleh Gaspar (2018) yang menyimpulkan bahwa konflik pemuda Flores antar antar Desa Olung dan Desa Kayungo Sari utamanya di sebabkan oleh berberapa faktor yaitu karena faktor balas dendam dan pengaruh minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menimbulkan ketidaksadaran dan mabuk yang berujung pada perkelahian. Dari penelusuran literatur, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang keterlibatan pemuda dalam konflik Pilkada. Umumnya, penelitian-penelitian sebelumnya hanya banyak dilakukan tentang penelitian konflik Pilkada di satu sisi dan konflik pemuda di sisi lainnya. Sehingga belum ada satupun penelitian yang menggabungkan diantara keduanya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri lebih mendalam berkaitan dengan keterlibatan pemuda sebagai pemicu konflik. Bagaimana pemuda berperan aktif

aktor pemicu konflik dan mengapa hal tersebut dilakukan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diruncingkan di bagian rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas, telah menggambarkan tentang keterlibatan pemuda sebagai pemicu konflik Pilkada Kota Palopo tahun 2013. Oleh sebab, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan pemuda sebagai pemicu konflik Pilkada?
2. Bagaimana keterlibatan pemuda pada saat terjadi eskalasi konflik Pilkada?
3. Bagaimana peranan yang ditempuh pemuda dan stakeholder dalam resolusi konflik yang berjalan?
4. Bagaimana dampak konflik terhadap kondisi wilayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keterlibatan pemuda sebagai pemicu konflik Pilkada.
2. Untuk menganalisis keterlibatan pemuda pada saat terjadi eskalasi

konflik Pilkada.

Untuk menganalisis peranan pemuda dan stakeholder dalam upaya resolusi konflik yang berjalan.



4. Untuk menganalisis dampak kerusakan infrastruktur wilayah dari peristiwa konflik.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian dibagi kedalam dua aspek yaitu aspek akademis dan aspek praktis, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat akademis, diharapkan mampu menjadi literatur tentang kepemudaan khususnya berkaitan antara pemuda dengan konflik politik dan memudahkan penelitian selanjutnya untuk melihat objek yang sama dengan variabel yang berbeda.
2. Manfaat praktis, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk semua pihak, agar peristiwa konflik Pilkada Kota Palopo tahun 2013 tidak terulang kembali baik di Kota Palopo maupun di daerah lainnya di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Konflik

Para teoritikus ilmu sosial memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan fenomena konflik. Secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa Latin 'con' yang berarti bersama dan 'fligere' yang berarti benturan atau tabrakan. Benturan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat, persaingan, antar individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, atau kelompok dengan pemerintah. Beberapa teoritikus konflik memberikan pandangan dan analisis yang berbeda tentang konflik.

Karl Marx (1818-1883) merupakan tokoh utama teori konflik. Banyak sumbangsih pemikiran perihal konflik yang telah dituliskan Marx, tetapi untuk tujuan penelitian ini, di sini hanya akan dipaparkan secara singkat mengenai teori analisis kelas. Tesis utama Marx adalah bahwa masyarakat selalu tersusun atas kelas-kelas sosial yakni kelas pemilik alat produksi dan kelas yang tidak menguasai alat produksi. Alat produksi bisa berupa mesin, tanah, sumber daya, tenaga kerja, kemampuan, kekuasaan, informasi, dan lain-lain. Setiap kelas memiliki kepentingan sendiri. Kelas pemilik alat produksi selalu berupaya untuk mempertahankan bahkan menambah (mengakumulasi) alat produksinya,



sementara kelas yang tidak memiliki alat produksi mempunyai kepentingan merebut alat produksi tersebut. Menurut kaum Marxian, hal inilah yang menjadi akar dari segala macam konflik di masyarakat. Oleh karena itu, sejarah perkembangan masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas-kelas tersebut (Ritzer, 2010).

Pada masyarakat pra-kapitalis atau masa feodal dimana tanah menjadi satu-satunya alat produksi maka pertentangan kelas terjadi antara kaum pemilik tanah dengan kaum yang tidak memiliki atau tidak menguasai tanah. Sejalan dengan perkembangan sejarah, maka pada masyarakat kapitalis, dengan industri sebagai modal produksi maka alat produksi berupa mesin, tenaga kerja, dan berbagai macam keahlian sebagai alat produksi utama. Oleh karena itu, pertentangan kelas terjadi antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh. Sebagaimana dijelaskan di atas, setiap kelas memiliki kepentingan masing-masing. Pada masa feodal, kelas pemilik tanah berupaya untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya dan kaum yang tidak memiliki tanah berupaya melakukan reforma agraria. Sementara itu, pada masyarakat kapitalis, kelas pemilik modal memiliki kepentingan untuk mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya dan kaum buruh berupaya untuk memperoleh upah yang laik (Ritzer, 2010).

Dalam analisis kelas Marxian, kepentingan kelas selalu berkaitan dengan kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah kesadaran kelas subyektif akan kepentingan kelas objektif yang dimiliki



bersama orang lain dalam posisi serupa dalam sistem produksi. Itu berarti kesadaran kelas muncul ketika individu-individu membangun jaringan komunikasi dan membangun organisasi. Dengan formulasi yang lain, kesadaran kelas akan muncul pada saat berada bersama dengan orang lain dalam satu kelas tertentu. Kesadaran kelas inilah yang kemudian membangkitkan perjuangan kelas (Jehamat, 2011).

Ralf Dahrendorf (1929-2009) seorang teoritikus ilmu sosial mengembangkan teori konflik untuk menentang teori fungsional struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan olehnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori fungsional struktural. Jika menurut teori fungsional struktural bahwa masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik Dahrendorf adalah sebaliknya, dalam hal ini masyarakat dianggap berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya (Ritzer, 2010).

Jika menurut teori fungsional struktural bahwa setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dalam masyarakat. Perbedaan lainnya, penganut teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal

ma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, sedangkan teori konflik melihat bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah



disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Ritzer, 2010).

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (Poloma, 2007). Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus). Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya (Ritzer, 2007).

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap

kinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik



adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (Ritzer, 2010).

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. (Ritzer, 2007).

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu disebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (*latent interest*), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama dapat dipandang sebagai kelompok semu (*quasi group*). Sebaliknya kepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan manifest (Raho, 2007). Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama,

semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu



harus bergabung dalam suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya (Ritzer, 2007).

Pemahaman akan konflik menurut Lewis Coser (1913-2003) adalah suatu kesadaran yang mencerminkan semangat pembaruan di dalam masyarakat yang nantinya mungkin dapat dijadikan sebagai suatu alat yang sifatnya instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan atas struktur sosial yang ada. Selain itu, konflik juga dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau beberapa kelompok yang akhirnya dengan adanya konflik akan membuat kelompok yang lain untuk memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di lingkungannya (Demartoto, 2017).

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik menjadi dua bagian yaitu realistik dan tidak realistik. Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contoh dari konflik realistik adalah para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji dan berbagai keuntungan buruh lainnya (Poloma, 2007).

Coser memberikan definisi konflik yang tidak realistik sebagai konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis



tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, minimal dari salah satu pihak. Misalnya, dalam masyarakat tradisional, pembalasan dendam lewat ilmu gaib merupakan bentuk konflik tidak realistis: sebagaimana *pengkambing hitaman* yang sering terjadi dalam masyarakat urban. Dalam hubungan antar kelompok, *pengkambing hitaman* digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak melepaskan prasangka mereka melawan kelompok yang benar-benar merupakan lawan dan dengan demikian menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka (Demartoto, 2017).

Dalam keadaan demikian, Coser mempertegas bahwa konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari relasi yang hidup sedangkan tidak berkonflik berarti penekanan pada masalah-masalah yang cenderung untuk dilupakan kelak akan menciptakan suasana yang benar-benar kacau. Ditambahkan oleh Coser konflik memiliki muatan positif fungsional sejauh bergerak melawan struktur. Dimana suatu konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan. Coser menjelaskan berdasarkan hasil pengamatannya dalam kehidupan masyarakat bahwa terdapat hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena homogenitas diperlukan bagi kelangsungan

kelompok terisolir yang berarti konflik internal tidak ada, yang akan lemahnya interaksi internal dalam kelompok tersebut.



Sebagai contoh dalam perkawinan, seseorang yang ingin menjadi orang tua sedangkan pasangannya belum ingin memiliki anak. Maka konflik punya anak atau tidak menyangkut perjanjian mengenai tujuan hubungan itu sendiri (Poloma, 2007).

Pruitt mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya (Pruitt, 2009).

Konflik dapat diartikan juga sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumberkemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Lawang, 1994).

3.1. Konflik Pilkada

Prinsip-prinsip berdemokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi hak-hak rakyat, dimana rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya,



melalui pemilu rakyatlah berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bakal pemimpin masa depan. Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (Pilkada) adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin didaerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar. Pilkada menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi (Amiruddin, 2017).

Dalam proses pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ternyata seringkali menyebabkan sejumlah persoalan terkait proses pelaksanaannya yang dinilai cenderung menghamburkan dana rakyat termasuk dugaan *money politic*, serta tidak jarang hasil Pilkada langsung itu direspon secara negatif sehingga berbuntut kerusuhan dan kekerasan. Dalam konteks negara demokrasi, Maswadi Rauf menyatakan bahwa wajar apabila demokrasi dipenuhi oleh konflik karena setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingan dan pendapat masing-masing yang bukan saja berbeda tetapi bahkan dapat bertentangan satu sama lain (Nas, 2007).

Kebebasan untuk mengkritik atau menentang pihak lain yang mempunyai pendapat dan kepentingan yang berbeda atau berlawanan yang membuat konflik kepentingan pesat didalam masyarakat. Untuk

Indonesia yang berada dalam transisi demokrasi, munculnya yang lahir sebagai akibat dari perbedaan kepentingan mungkin



dapat dipahami sebagai proses menuju konsolidasi demokrasi dan pelembagaan demokrasi. Untuk mengatasi dampak negatif yang dapat dihasilkan oleh konflik, demokrasi mengharuskan adanya kemampuan warga masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik sebelum konflik menjadi intensif dan ekstensif. Demokrasi mengharuskan adanya keterampilan untuk menyelesaikan konflik sebagai jalan keluar dari konflik yang terjadi (Amiruddin, 2017).

Konflik Pilkada atau sering disebut konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial dimana keduanya memiliki ciri-ciri identik, hanya yang yang membedakan konflik sosial dan konflik politik adalah kata 'politik' yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik. Yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/pemerintah, pejabat politik/partai politik dan kebijakan (Rauf, 2001). Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Hidayat, 2002).

Hal tersebut dapat dibenarkan dengan mengacu peneliti sebelumnya yang relevan dengan konflik pilkada yang diteliti oleh Nehrun (2016) yang melakukan riset dengan studi kasus Konflik elite dalam

n Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo pada tahun 2013.

sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi



Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Damba. Konflik tersebut berujung pemecatan Adhan Damba dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementara konflik elite saat Pilkada terjadi antara elite partai dengan elite calon, calon dengan calon, serta elite calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif.

Oleh karena itu, konflik dalam pilkada memang merupakan fenomena yang biasa terjadi, motifnya kadang-kadang bervariasi. Seperti penelitian yang sebelumnya juga dilakukan oleh Armunanto (2015) yang mencoba menelusuri jejak Potensi konflik pada pemilihan kepala daerah langsung di Kota Makassar pada tahun 2013. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan ada dua faktor yang sangat potensial menjadi embrio lahirkan konflik dalam pilkada yakni, faktor sosiologis dan faktor institusional. Kondisi sosiologis sangat menentukan lahirkan konflik dalam sebuah pilkada. Di Sulawesi Selatan misalnya, motif sosiologis ini merupakan faktor yang sangat potensial menimbulkan konflik pada setiap penyelenggaraan pilkada. Sebab, hubungan yang dibentuk cenderung melahirkan hubungan politik yang kuat. Ini dikarenakan ikatan sosial yang kuat dalam keluarga, komunitas, kelompok, etnis, dan lainnya ditransfer

yang bersifat emosional sehingga ketika ikatan yang kuat ini



dimanfaatkan untuk memobilisasi massa menjadi militan (Amiruddin, 2017).

Sama halnya dengan faktor institusional, dalam hal ini, jika institusi penyelenggara pilkada tidak menjalankan sesuai regulasi, maka akan mengakibatkan adanya kecurangan yang berbuntut terjadinya konflik. Faktor institusional ini bias dilihat dengan mengurai konflik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2015. Siswanto (2017), peneliti ini menemukan bukti KPU Jember kurang transparan. KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan LPPDK.

Selaras dengan hasil riset Armunanto, konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, demikian juga dengan perilaku penguasa beserta aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik (Surbakti, 1992).

Sebagai bagian dari aktivitas politik, konflik suatu jenis interaksi yang ditandai dengan benturan atau tabrakan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program dan pribadi, atau persoalan fundamental lainnya yang satu sama lain bersebrangan. Dengan demikian makna 'benturan' seperti kepentingan dapat digambarkan seperti

an pendapat, persaingan antar individu dan individu, individu dan



kelompok, kelompok dan kelompok, dan kelompok dengan pemerintah (Plano, 1994 & Surbakti, 1992).

Dalam sosial politik, konflik akan dibangun atas dasar kepentingan semata. Bagaimana konflik itu berkembang hanya merupakan suatu proses dalam kegiatan politik. Kepentingan-kepentingan yang berbeda merupakan akar permasalahan dalam proses konflik. Hubungan kekuasaan (*authority*) yang menyangkut tentang hubungan orang atau kelompok yang dikuasai dengan yang menguasai akan selalu menjadi bagian dari dinamika yang melahirkan konflik. Otoritas tersebut akan melahirkan dua kelas yang berbeda. Ada dikotomi antara orang yang menguasai dan dikuasai. Dominasi oleh kelas yang berbeda di mana kelas yang satu memiliki kekuasaan dalam struktur yang menjamin kekuatan yang dimiliki untuk menguasai kelompok yang berbeda. Biasanya kelompok yang ada dalam dua sistem kelas memiliki peran yang berbeda. Kelas yang menguasai memiliki sedikit banyak kekuasaan dalam jabatan struktural dan yang lain tidak. Jabatan struktural inilah sebagai legitimasi kekuasaan untuk menguasai kelompok yang lain (Dahrendrof, 1995 dalam Poloma, 2007).

Karena konflik politik senantiasa mengalami pasang surut sesuai dengan momen politik dan kepentingan politik yang menyertainya, seperti rekrutmen elit lokal melalui Pilkada. Proses politik seperti itu sarat dengan

kepentingan antar berbagai pihak, sehingga tidak mengherankan konflik politik memiliki struktur konflik atau adanya sejumlah pihak



yang berlatar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda kepentingannya bermain di dalam arena tersebut. Bersama dengan itu konflik pun mempunyai keluasan, ketampakan dan intensitas yang berbeda-beda, baik dari segi waktu (momen politik) atau situasi sosial politik tertentu, seperti pada musim Pilkada (Taqwa, 2013).

Heryanto (2008) menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik Pilkada terjadi yang disebabkan oleh lima poin berikut ini:

1. Tahapan pendaftaran calon yang umumnya memiliki peluang adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPUD.
2. Sengketa Pilkada juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Banyak masyarakat di suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada merasa berhak untuk menjadi pemilih, tapi kenyataannya tidak terdaftar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan sangat memungkinkan menjadi determinan konflik.
3. Konflik juga sangat mungkin lahir dari eksekusi masa kampanye. Berbagai upaya dilakukan untuk memasarkan politik (*marketing of politics*) untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus juga dibarengi dengan tindakan menyerang, mendeskreditkan, *black campaign*, pembunuhan karakter yang dapat menimbulkan rasa sakit hati. Jika menemukan momentumnya, hal ini pun dapat menjadi akselerator konflik dalam Pilkada.



4. Tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang Pilkada. Fenomena yang sering muncul adalah, pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis, selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah.
5. Konflik juga bisa jadi muncul di proses penetapan pemenang. Kasus di beberapa daerah, DPRD tidak mau menetapkan hasil Pilkada. Terutama, di daerah yang mayoritas anggota DPRD-nya berasal dari kubu yang bersebrangan dengan kandidat yang terpilih. Meskipun tidak memiliki dampak yuridis terhadap hasil Pilkada, namun penolakan DPRD tersebut memunculkan sengketa politik berkepanjangan pasca Pilkada.

3. Konflik dan Pemuda

Pemuda adalah aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan sosial. Mengambil contoh dari Indonesia, dua tema penting dalam kajian-kajian makro perubahan sosial adalah proses urbanisasi (pergerakan spasial populasi) dan de-agrarianisasi (pergeseran sektoral dalam pekerjaan). Sering dilupakan bahwa kedua pergeseran ini dilakukan oleh pemuda. Pemuda dan bukan orang tua yang



pindah ke kota mencari pekerjaan, pemuda jugalah yang memutuskan bahwa masa depan mereka bukan di bidang pertanian (White, 2012).

Walaupun definisi PBB tentang pemuda biasanya mencakupi mereka yang berusia 15-24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan anak yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal pemuda hingga usia yang mengherankan. Undang-undang tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun” (UU No. 40 Tahun 2009, Pasal 1.1).(Menpora, tanpa tahun& ILO, 2007).

Penjelasan tentang definisi pemuda di atas menjadi bahan perhatian oleh organisasi internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk masa depan bangsa dan negara. Abdullah (1974) berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat, antara lain:

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru

Semangat pengabdianya

Spontanitas dan pengabdianya



5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri
8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikakan

pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda diharapkan menjadi generasi penerus dengan kualitas dan mental yang lebih baik. Namun adanya pengaruh buruk terhadap pemuda menjadi masalah tersendiri. Masalah ini banyak terjadi di tengah masyarakat, para teoritikus psikolog menyebutnya sebagai penyimpangan perilaku. Misalnya, penggunaan obat terlarang, minuman keras, judi, pencurian hingga kekerasan fisik (Dewi, 2014).

Mulya (2013) memandang bahwa pemuda lebih dilihat pada aspek kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh insisatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda. Acuan yang kedua inilah yang pada masa lalu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia tidak

gi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda.



Demikian juga yang dikemukakan Soekonto (2000) yang menjelaskan bahwa masa muda dikatakan sebagai sesuatu masa yang berbahaya, karena pada periode ini seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju ketahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami perkembangan. Masa remaja merupakan masa penuh gejolak emosi dan ketidakseimbangan.

Pemuda seringkali mudah marah, mudah terangsang, emosinya mudah meledak dan kurang bisa mengendalikan perasaannya. Ketidakmatangan emosi pada kaum muda membuat mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak tepat. Reaksinya itu tampil dalam tingkah laku yang agresif seperti melawan, bertengkar, berkelahi dan senang mengganggu (Fisher 2002).

Dalam konstruksi sosial dan ilmiah pemuda memang cenderung dipandang sebagai periode 'transisi' dari anak-anak menjadi dewasa, dari pendidikan menuju pekerjaan dari keluarga asal ke keluarga tujuan (Roberts, 2009 & Lloyd 2005). Demikian juga yang dipaparkan Bank Dunia yang memandang kepemudaan sebagai transisi yang saling berkaitan (World Bank, 2006). Oleh karena masa transisi pemuda bisa menjadi aset untuk masa suatu bangsa tetapi bisa juga menjadi

hanya jika kecenderungan proses transisi condong kearah negatif.



4. Resolusi Konflik

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai penyebab konflik pemuda dalam pandangan Soekanto (1990) yang terdiri atas tiga indikator yaitu, yaitu: (1) kepentingan (interests), baik yang bersifat subyektif ataupun obyektif; (2) emosi (emotional), yaitu perasaan seperti kemarahan, ketakutan dan lain-lain;(3) nilai (values), yang seringkali sulit terukur dan tertanam pada ide dan perasaan mengenai benar dan salah dalam mengatur perilaku kita (Soekanto, 1990).

Oleh karena itu, dalam melakukan resolusi konflik, sangat penting untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, guna memudahkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gaspar, mengenai kasus perang antar pemuda desa di Flores, dimana Pemuda Flores Desa Olung terlibat konflik dengan pemuda Desa Kayungo Sari utamanya. Setelah dilakukan pengamatan, kedua kelompok pemuda desa terlibat konflik disebabkan karena faktor balas dendam dan pengaruh minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menimbulkan ketidaksadaran dan mabuk yang berujung pada perkelahian (Gaspar, 2018).

Lain halnya dengan konflik kaum yang kerap terjadi di Kecamatan

Cermin Kabupaten Pesawaran. (Indah: 2014), di dalam

nya menemukan bahwa Hal itu sering terjadi karena hubungan



antar kaum muda kurang berjalan dengan baik, dikarenakan perilakunya yang sering melanggar norma, baik norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma adat dan norma hukum. Dalam pergaulannya sehari-hari sering timbul perselisihan dan kesalahpahaman yang berdampak konflik. Minum-minuman keras, serta faktor pendidikan dan ekonomi yang lemah dianggap sebagai pemicu utama timbulnya perselisihan. Selain itu faktor etnik dan keberpihakan aparat turut memicu timbulnya perselisihan yang ada (Indah, 2014)

Termasuk dalam pemilihan kepala daerah, meskipun disadari bahwa konflik dalam Pilkada merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, namun peristiwa sosial tersebut tidak boleh dilakukan pembiaran. Keteraturan sosial (*social order*) atau dalam tatanan yang lebih besar yaitu integrasi bangsa tetap dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu resolusi atau pengelolaan konflik dalam Pilkada menjadi penting untuk dipikirkan. Dalam hal ini resolusi konflik dapat diartikan sebagai usaha menyelesaikan konflik dengan cara-cara analistis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik dilakukan untuk memberikan penyelesaian atas masalah yang terjadi (Wahyudi, 2011).

Menurut Hardjana (1994) resolusi konflik terdiri dari lima bentuk yang terdiri dari:

1. Bersaing dan bertanding (*competition*); menguasai (*dominating*) dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik menang-kalah.



2. Kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Dalam hal ini pihak yang terlibat konflik bekerjasama dan mencari penyelesaian konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang
3. Kompromi (*comfroming*) dan negosiasi (*negosiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik tidak ada yang menang atau kalah.
4. Menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdraw*). Pendekatan ini adalah pendekatan kalah-kalah, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bahkan mereka tidak menarik perhatian terhadap apa yang dikonflikkan.
5. Menyesuaikan (*accomodating*); memperlunak (*smoothing*) dan menurut (*obliging*). Bentuk pendekatan konflik ini merupakan pendekatan menang-kalah.

Tingkat keberhasilan suatu resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Secara umum, menurut Fatah dalam Darmawan (2013) efektivitas resolusi konflik dibagi dalam tiga tingkatan:

1. Efektivitas tinggi, yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi konsensus.
2. Efektivitas semu, yaitu resolusi konflik yang hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan.



3. Efektivitas rendah, yaitu resolusi konflik politik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk konflik ini biasanya dimatikan secara koersif/refresif.

Dari banyak teoritikus yang mengkaji tentang resolusi atau penyelesaian konflik, secara garis besar Nasikun (2003) menyederhanakan menjadi empat bentuk dengan yang paling lazim dilakukan:

1. Konsiliasi (*conciliation*). Penyelesaian dengan menggunakan bentuk ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
2. Mediasi (*mediation*) bentuk penyelesaian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang berkonflik bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Mediasi dalam hal ini diartikan sebagai penyelesaian konflik dimana kedua belah pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli lembaga tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tertentu mengenai masalah yang dipertentangkan), tetapi nasihat dari pihak ketiga tidak mengikat kedua belah pihak.



3. Arbitrase, bentuk penyelesaian ini berbeda dengan konsultasi dan mediasi. Seorang arbiter member keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, pihak tersebut dapat mengajukan banding hingga tingkatan pengadilan tertinggi.
4. Perwasitan, dalam hal ini kedua belah pihak yang berkonflik bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik diantara mereka.

Upaya resolusi konflik yang telah dijabarkan di atas akan dibenturkan dengan kondisi dalam penelitian ini yaitu keterlibatan pemuda dalam konflik Pilkada, maka dipandang perlu keterlibatan stakeholder dalam upaya tersebut. Masing-masing stakeholder mempunyai kekuasaan relatif untuk mempengaruhi arah atau resolusi sebuah konflik. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai “kapasitas untuk mencapai hasil” (Ramirez, 1999). Termasuk di dalamnya kemampuan untuk membuat atau mencegah perubahan.

Stakeholder dalam resolusi konflik memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta dalam usahanya menyelesaikan konflik dalam Pilkada yang terjadi di daerahnya.

Langkah yang adalah jajak pendapat dan mengadakan pertemuan dengan

der di Kota Yogyakarta (Darmawan, 2013).



Selain Penyelenggara teknis, penyelenggara pengawasan juga memiliki peranan yang sama pentingnya. Seperti kasus konflik yang disebabkan karena perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terjadi di Aceh. Di mana Panwaslu menggunakan metode pencegahan konflik dan mediasi untuk meminimalkan konflik antar pendukung (Hadi, 2018).

Kekuasaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti: kekuatan fisik, daya tahan, kapasitas untuk kekerasan; pesona pribadi, karisma; Kekuatan emosional, keberanian, kepemimpinan, komitmen, integritas; kekuatan sosialekonomi, politik: kontrol atas akses sumber daya, hak, uang, barang-barang, status sosial ekonomi, institusi-institusi politik, SDM; kekuatan budaya : norma-norma dan nilai-nilai yang mapan, pembenaran dan penguatan peran yang berbeda, hak dan kewajiban dalam masyarakat; kontrol terhadap informasi: teknis, perencanaan, ekonomi, politik; Kemampuan: kapasitas atau keahlian; Kemampuan untuk memaksa: ancaman, akses kepada dan penggunaan media, ikatan kekeluargaan atau politik, mobilisasi tindakan langsung (Ramirez, 1999).

Para stakeholder saling memberikan otoritas satu sama lain untuk menghasilkan sebuah keputusan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak berarti bahwa pihak yang lebih kuat harus menyerahkan kekuasaan, atau semua sumber daya didistribusikan secara merata. Kolaborasi yang mendasar terjadi ketika para stakeholder telah saling menyetujui legitimasi

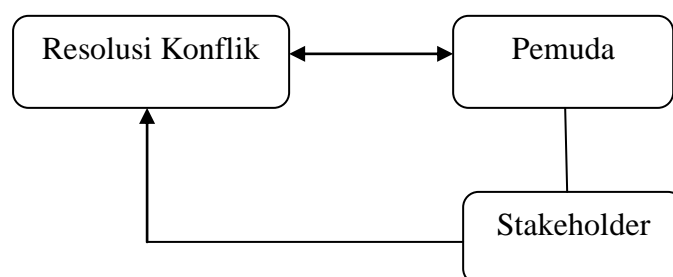
kekuasaan mereka untuk mendefinisikan masalah dan mengusulkan
keputusan (Healy, 1989). Ketidaksetaraan yang besar merupakan



sebuah halangan bagi kolaborasi. Kelompok-kelompok yang kuat sering bertindak secara sepihak dan menolak untuk berunding atau berkolaborasi. Mereka juga mungkin memaksa pihak yang lemah untuk “menyetujui” sebuah keputusan.

Oleh sebab itu penting untuk mengetahui seberapa banyak kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh setiap stakeholder, jenis kekuasaan apa dan dari mana. Seperti kesuksesan resolusi konflik yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara Pilkada di Kota Cimahi Jawa Barat dalam menghadapi konflik antar pendukung yang terjadi ketika masa kampanye, di mana konflik dapat dikekang sehingga tidak berubah menjadi konflik terbuka diantara para pendukung pasangan calon. Hal ini dapat diwujudkan karena pihak penyelenggara telah melakukan upaya pencegahan dengan instrumen hukum yang berlaku (Humaedi dkk, 2018).

Mengenai resolusi konflik, relasi pemuda dan stakeholder dapat digambarkan dengan skema seperti berikut ini:



5. Dinamika Politik Pemuda

Memotret peran dan partisipasi politik pemuda dalam pentas perpolitikan tentu sangat penting bagi upaya mencari jalan sebagai upaya memahami eksistensi politik pemuda. Menurut Jurdi (2012) pemuda akan menghadapi dua kekuatan besar dalam memainkan peran politiknya

1. Kekuatan ekonomi yang memanfaatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambilan kebijakan. Kekuatan ekonomi dapat melunakkan sejumlah idealism pemuda, bahkan dikhawatirkan akan terjerumus dalam pragmatism politik, alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya.
2. Kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan reformis dan *status quo* menjadi kabur, bahkan partai-partai reformis telah disusupi oleh politisi-politisi kudu loncat, termasuk politisi muda.

Dilanjutkan oleh Jurdi (2012) bahwa untuk mengantisipasi dua kekuatan tersebut, pemuda harus hadir sebagai individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang unggul, menghindari permainan politik yang tidak bermoral. Pemuda perlu menunjukkan kualitas diri bahwa pemuda memiliki kapasitas untuk melakukan dari dalam struktur negara dan memangkas habis system yang korup. Dengan demikian, etika dan

politik yang unggul dalam sistem politik yang demokratis akan dapat

kan.



Peran pemuda akan lebih klop apabila mampu menjaga keseimbangan dirinya dan menjaga konsistensi dengan menyantunya antara perkataan dan perbuatan (tutur kata dan perilaku), pemuda menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan bertindak atas dasar kebenaran. Pemuda yang visioner adalah pemuda yang dalam dirinya terdapat esensi kepemimpinan yang bersifat integratif. Artinya pemuda perlu memiliki kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum dan budaya (Jurdi. 2012).

B. Kerangka Pikir

Sejatinya demokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat berkuasa untuk menentukan nasibnya dengan mencari pemimpin terbaik, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ajang yang seharusnya menjadi tempat memilih calon kepala daerah secara demokratis dalam melahirkan figur pemimpin-pemimpin terbaik, bukan justru berubah menjadi kerusuhan. Itulah yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kerugian yang ditimbulkannya pun tidak sedikit. Sejumlah Kantor dan fasilitas pemerintah dibakar oleh amuk massa.

Kerusuhan yang terjadi awalnya disebabkan adanya dugaan pengelumbungan suara oleh pihak penyelenggara yang dilakukan

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wara Timur yang
o merugikan pendukung dari salah satu pasangan calon.



Keterlibatan pemuda sangat nampak sejak awal mula konflik dengan merayakan kemenangan versi dari dukungan calon pasangan masing-masing dengan melakukan konvoi dan arak-arakan. Kuat dugaan hal lain yang menjadi penyebab tersalutnya amuk massa karena satu hari sebelum penetapan KPUD Palopo kedua pasangan tersebut sudah sempat merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi dan arak-arakan sepanjang jalan di pusat Kota Palopo. Begitu mengetahui hasil penetapan KPUD yang memenangkan pemilukada adalah pasangan Judas Amir–Ahmad Syarifuddin, maka kelompok massa pendukung pasangan Haidir Basir–Thamrin Jufri tidak bisa menerimanya dan kemudian terprovokasi melakukan pengrusakan dan pembakaran.

Sejak awal konflik sampai dengan terjadinya eskalasi konflik parah pemuda bagian dari tim pendukung yang dinyatakan kalah oleh KPUD menjadi bagian unsur yang terlibat memobilisasi massa, dan sebagian banyak pemuda menjadi bagian yang dimobilisasi beserta komponen yang lainnya ketika terjadi kekacauan dan pembakaran pada peristiwa terjadinya konflik.

Dampak dari kerusuhan Pilkada berbuntut perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah daerah. Seperti yang diketahui massa membakar Kantor Camat Wara Timur, pengrusakan dan pembakaran Kantor Panwaslu, selanjutnya massa membakar Kantor Partai Golkar

hingga ludes. Amuk massa tidak berhenti disitu mereka juga membakar Kantor Harian Palopo Pos. Terakhir massa membakar Kantor



Walikota Palopo hingga tak tersisa. Dari rangkaian peristiwa konflik Pilkada Kota Palopo yang terjadi, tahap selanjutnya akan membahas peran pemuda dalam resolusi konflik yang sedang berjalan dari peristiwa konflik tersebut. Untuk lebih jelasnya diskemakan seperti bagan berikut ini:



Bagan 2.1
Kerangka Pikir

